

## KINERJA KEUANGAN DAERAH MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM PADA PERTUMBUHAN EKONOMI

Agus Adi Pratama Putra<sup>1</sup>  
I Gusti Ayu Nyoman Budiasih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
email: gusadipratama@gmail.com telp: +6281239649179

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

### ABSTRAK

Meningkatnya PAD dan DAU diduga tidak serta merta dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi karena adanya faktor kontinjensi yaitu Kinerja Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU pada Pertumbuhan Ekonomi serta kemampuan Kinerja Keuangan Daerah memoderasi PAD dan DAU pada Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini mencakup lingkup 8 kabupaten dan 1 kota madya di Provinsi Bali. Data yang digunakan yaitu data realisasi APBD dan PDRB tahun 2009-2013. Data dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji asumsi klasik dan uji kesesuaian model yang diolah menggunakan teknik *Moderated Regression Analysis* (MRA). Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi sedangkan DAU tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi. Uji moderasi menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah mampu meningkatkan pengaruh PAD pada Pertumbuhan Ekonomi sedangkan masuknya Kinerja Keuangan sebagai pemoderasi tidak mampu meningkatkan pengaruh DAU pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali.

**Kata Kunci:** PAD, DAU, Pertumbuhan Ekonomi, Kinerja Keuangan Daerah

### ABSTRACT

*Increased PAD and DAU allegedly not necessarily be increasing economic growth due to factor contingencies, namely the Regional Financial Performance. This study aims to determine the effect of PAD and DAU on Economic Growth and the ability of the Regional Financial Performance moderating PAD and DAU on economic growth. This study covers 8 districts and 1 municipality in the province of Bali. The data used is APBD realization and PDRB from years 2009 to 2013. The data in this study has been qualified classical assumption test and conformance test were processed using techniques Moderated Regression Analysis (MRA). Based on the results that has been done shows that PAD has a positive effect but not significant on economic growth while DAU has no effect on economic growth. Moderation test shows that the Regional Financial Performance able to increase PAD influence on economic growth, while the Regional financial performance as the moderating is not able to increase DAU effect on economic growth in the province of Bali.*

**Keywords:** PAD, DAU, Economic Growth, Regional Financial Performance

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemajuan produksi barang dan jasa melalui perkembangan aktivitas perekonomian dalam masyarakat (Sukirno, 2010:9).

Secara umum pertumbuhan ekonomi suatu daerah di cirikan dengan adanya

peningkatan pembangunan infrastruktur sektor publik yang nantinya diharapkan dapat mendongkrak perekonomian rakyat dan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan sarana publik adalah penunjang pertumbuhan ekonomi, sehingga melalui kesiapan infrastruktur, maka produktivitas dapat ditingkatkan (Modebe *et al.*, 2012). Namun hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan yang terjadi. Contohnya, tahun 1997-1998 terjadi krisis yang melumpuhkan perekonomian, khususnya di Bali pada saat itu sehingga angka pengangguran melonjak dan berbagai perusahaan gulung tikar. Melihat kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan sistem pemerintahan terbaru yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Sistem periode sebelumnya dirubah ke arah desentralisasi atau yang secara umum disebut otonomi daerah (Gunantara, 2014).

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah guna mengelola urusan daerahnya sendiri dengan meminimalkan intervensi dari pihak pusat. Otonomi daerah mulai berlaku pada 1 Januari 2001, dengan melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan daerah secara meluas guna memaksimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah secara efektif dan efisien (Dwirandra, 2013). Regulasi tersebut sejalan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Penerapan regulasi otonomi daerah menyebabkan daerah lebih leluasa dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, sehingga menghilangkan jarak antara pemerintah dengan masyarakatnya dan begitu sebaliknya. Namun, di lain pihak adanya kebijakan

otonomi daerah tersebut mengakibatkan adanya timpangan antara daerah, hal ini dikarenakan perbedaan tinggi rendah SDA dan SDM yang dimiliki, menyebabkan pembangunan di salah satu daerah terlampaui tinggi sementara di daerah lainnya jauh tertinggal. Salah satu wujud penerapan otonomi daerah adalah adanya kewenangan dalam memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah yang disebut desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal mewajibkan daerah memaksimalkan pengelolaan keuangannya dengan baik, yang nantinya berguna menunjang berbagai sektor daerah, khususnya di bidang pelayanan publik. Pembaharuan infrastruktur di sektor publik dipandang sangat penting direalisasikan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas publik dan penunjang lainnya dan membuka peluang bagi daerah guna menarik pemodal dalam berinvestasi, hal tersebut tentu akan memaksimalkan angka pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Kebijakan ini diberlakukan untuk seluruh jajaran pemerintahan daerah Indonesia tanpa terkecuali, bahkan hasil realisasinya sudah berdampak di Provinsi Bali. Dikutip dari *beritadewata.com*, sektor pariwisata merupakan sektor unggulan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Bali. Di samping itu sektor pertanian dan jasa juga berperan aktif dalam pertumbuhan ekonomi serta di tahun 2015 ini pertumbuhan ekonomi Bali juga dipengaruhi oleh sektor investasi. Dua hal penting yang harus dilaksanakan pemerintah daerah adalah kemampuan menggali potensi sumber daya yang ada di Provinsi Bali serta memaksimalkan pengalokasian seluruh penerimaan dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi

yang pada akhirnya akan berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional (Gunantara, 2014).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menyatakan Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari satu kesatuan sumber pendanaan daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian tingkat keuntungan BUMD dan penerimaan lain-lain yang sah. Sidik (2002) berpendapat bahwa optimalisasi potensi keuangan dipandang penting bagi pemerintah daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini dikarenakan terdapat peluang untuk menggali berbagai peluang sumber pendapatan lokal akibat pelimpahan kuasa dari pusat ke daerah. Tinggi rendah PAD menstimulasi angka belanja modal yang dianggarkan pemerintah daerah, sehingga memacu pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya hal yang mungkin terjadi adalah eksploitasi PAD pada publik tanpa imbal hasil kuantitas dan kualitas pelayanan yang memadai, sebagai konsekuensinya produk yang ditawarkan kepada masyarakat justru tidak direspon sesuai yang diharapkan (Mardiasmo, 2002; Saragih, 2003). Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan utama diharapkan dapat memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerah yang kemudian berangsur-angsur berimplikasi dalam lingkup nasional.

Desentralisasi fiskal, dari perspektif berbeda memberikan kekuasaan bagi daerah guna mencari dan memaksimalkan segala sumber daya potensial yang ada di daerah masing-masing dan kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin, namun kenyataan di lapangan tidaklah sejalan dengan harapan yang diinginkan. Namun, bukti yang dipaparkan oleh beberapa studi sebelumnya menemukan

kenaikan PAD lebih kecil dari presentase kenaikan dari transfer dana perimbangan, sehingga realisasi otonomi daerah dinyatakan tidak menjamin keberhasilan kemandirian daerah bahkan menurun, walaupun jumlah absolutnya meningkat setelahnya (Adi, 2005). Otonomi daerah di beberapa tempat berhasil diselenggarakan dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki, namun masih terdapat daerah yang memiliki sumber daya terbatas atau ketidakmampuan mereka dalam mengelolanya, sehingga masih terdapat halangan bagi daerah tersebut dalam menyelenggarakan desentralisasi sebagaimana diwajibkan (Bappenas, 2003). Salah satunya adalah timpangan pemerataan dalam penyebaran kekuatan infrastruktur di segenap daerah di tanah air. Realisasi desentralisasi fiskal memberikan dampak lain seperti mewajibkan daerah untuk menanggung seluruh pengeluarannya sendiri, namun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai wilayah tidak dapat dipergunakan membiayai seluruh pengeluaran daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber utama penerimaan lokal daerah yang tersedia sangat bergantung pada realisasi kemampuan ekonomi ke dalam bentuk aktivitas ekonomi guna mewujudkan arus kas masuk demi pembangunan daerah secara terus-menerus (Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2006) dan hal ini menjadi titik tolak terjadinya senjangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu bagian dana perimbangan yang dikeluarkan oleh pusat guna membantu pembaharuan infrastruktur daerah bersangkutan guna mengatasi ketimpangan infrastruktur perekonomian serta memeratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum atau diistilahkan

sebagai dana yang dikirimkan dari pemerintah pusat kepada daerah dengan memaksimalkan kemampuan keuangan antar daerah secara merata sebagai visi utamanya, realisasi desentralisasi diwujudkan guna meminimalisir timpangan ekonomi yang terjadi antar daerah. Seluruh Negara di dunia melakukan transfer dana antar pemerintah sebagai fenomena yang umum terjadi di luar dari sistem pemerintahnya (Dwirandra, 2013) dan relasi keuangan antar keduanya telah menjadi suatu bentuk corak yang ditonjolkan (Nemec dan Wright, 1997). Akibatnya, pada periode setelahnya pemerintah daerah malah tidak berusaha mengoptimalkan penerimaan dari daerah khususnya pajak, tetapi menuntut transfer yang lebih tinggi dari pusat (Oates, 1999). Kasus yang sama juga dialami pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota di Indonesia (Mardiasmo, 2009). PAD dan bantuan pemerintah pusat berupa DAU diharapkan dapat dikelola secara bijak dan dialokasikan dengan efektif, agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Mardiasmo (2009:93) menyatakan ekspektasi dari tingginya modal yang diinvestasikan adalah kemampuan dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta secara terus-menerus mampu meningkatkan peran aktif masyarakat terhadap pembangunan.

Selain kedua sumber pendanaan tersebut, pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah merupakan hasil kerja yang berhasil dicapai di bidang keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan ketentuan perundang-undangan sebagai alat ukur yang ditetapkan dalam satu periode anggaran. Akuntabilitas dan integritas daerah dinilai dengan menggunakan kinerja keuangan

sebagai tolak ukurnya. Semakin besar biaya pembelanjaan daerah yang bersumber dari PAD dan DAU dan semakin baik kinerja keuangan yang dilakukan, maka akan semakin besar pembangunan infrastruktur publik yang dapat dikerjakan oleh pemerintah daerah. Suatu daerah dengan kemampuan keuangan yang dapat dipergunakan untuk membiayai realisasi otonomi daerah, dapat dinyatakan memiliki kinerja keuangannya yang baik.

Simanjuntak (2006) menganalisis bagaimana Pendapatan Asli Daerah memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu, dengan perolehan hasil positif dan signifikan, walaupun kemampuan PAD dalam memengaruhi angka pertumbuhan ekonomi masih terlampau kecil. Kemudian hasil yang sejalan juga diperoleh Gunantara (2014) di mana PAD dan DAU berhasil memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan. Namun, hasil sebelumnya bertolak belakang dengan pernyataan Andi Gustiana (2014) membuktikan bahwa PAD dan DAU tidak mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Inkonsistensi penelitian terdahulu menjadi motivator bagi peneliti untuk mendalami kembali ada tidaknya faktor lain yang menyertai selain PAD dan DAU dalam mendongkrak roda perekonomian. Perbedaannya terletak pada penggunaan kinerja keuangan daerah sebagai variabel pemoderasi dan tempat pelaksanaan penelitian dalam lingkup yang spesifik di Provinsi Bali.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi acuan guna sekaligus mendalami pengaruh kemampuan kinerja keuangan daerah dalam memoderasi realisasi PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian manfaat

praktis yang dapat diberikan khususnya bagi pemerintah daerah yang bersangkutan dijadikan sebagai informasi guna memaksimalkan pelayanan pada publik.

Teori keagenan dan *fiscal federalism* adalah dasar yang dijadikan sebagai landasan guna menentukan arah dari keempat hipotesis. Teori keagenan menjelaskan relasi yang terjadi melalui kontrak perjanjian, baik antara pihak *owner* yang dalam hal ini adalah pusat dan pihak *agent* yaitu daerah, dimana pusat memberikan hak kuasa serta wewenang bagi daerah untuk mandiri dalam hal pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan demi terselenggaranya otonomi daerah. Dalam konteks *public sector*, pemeran utama selaku prinsipal adalah masyarakat yang diproksian oleh DPRD dan pemerintah daerah bertindak sebagai agennya, di mana seharusnya segala sepak terjang agensi adalah mengikuti kehendak masyarakatnya, namun sebaliknya agem dalam hal ini cenderung bertindak oportunis. Selanjutnya teori *fiscal federalism* menjelaskan bagaimana tinggi rendah prospek pertumbuhan ekonomi ditentukan melalui devolusi pertanggungjawaban dari pusat ke daerah (Bodman *et al.*, 2009). Teori *fiscal federalism* diklasifikasikan ke dalam dua sudut pandang, yaitu perspektif tradisional dan baru. Perspektif tradisional lebih menitikberatkan keuntungan alokatif dari pelimpahan kuasa (Hayek, 1945). Terdapat dua opini pendukung perspektif ini, yaitu penggunaan *knowledge in society* yang menyiratkan keputusan yang terdesentralisasi lebih efisiensi dengan menimbang jalinan relasi yang sangat erat antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Kedua, yaitu pengalokasian belanja publik yang kompetitif membuka peluang bagi masyarakat



guna menyesuaikan pilihan barang dan jasa publik dengan selera dan keinginan mereka (Tiebout, 1956). Kemudian teori perspektif baru lebih menitik beratkan bagaimana desentralisasi memengaruhi perilaku pemerintah daerah (Musgrave, 1959; Oates, 1972).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali? 2) Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali? 3) Apakah kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali? 4) Apakah kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali?

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, 2) Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali, 3) Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali, 4) Untuk mengetahui apakah kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yang diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kemampuan kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang sejenis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu memberikan informasi kepada pemerintah daerah sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna menggali pendapatan daerah dengan sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang didapat oleh suatu daerah yang bersumber dari sektor perpajakan yang dibayar oleh wajib pajak di daerah tersebut, retribusi daerah, BUMD, dan penerimaan lain yang sah. PAD yang diperoleh daerah selanjutnya ditujukan untuk membiayai segala macam belanja daerah yang ditujukan untuk kepentingan publik, berupa pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Sehingga dengan adanya peningkatan fasilitas publik diharapkan akan dapat mendongkrak perekonomian rakyat sehingga Pertumbuhan Ekonomi di daerah dapat meningkat dan mensejahterakan kehidupan rakyat. Menurut Simanjuntak (2006) PAD dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah.

H<sub>1</sub>: PAD berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang ditransfer oleh pusat guna membiayai kebutuhan daerah dalam penerapan desentralisasi serta pemerataan

kemampuan keuangan daerah, yang berasal dari pengalokasian penerimaan APBN. Adanya bantuan sumber pendanaan dari pusat ke daerah diharapkan dapat mengalokasikan dana tersebut dengan baik untuk belanja daerah. Menurut Gunantara (2014) DAU dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Dengan meningkatnya fasilitas publik maka akan mensejahterakan rakyat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian di daerah.

H<sub>2</sub>: DAU berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Pendapatan daerah yang berasal dari PAD dan DAU diharapkan mampu untuk mendanai seluruh pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah didalam menjalankan pemerintahannya. Pengalokasian anggaran biaya ini, hendaknya digunakan untuk membiayai pembelanjaan daerah dengan kinerja keuangan daerah yang baik agar nantinya dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan menambah atau memperbaiki infrastruktur. Menurut Hamzah (2008) kinerja keuangan daerah secara positif mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Semakin besar biaya dan semakin baik kinerja keuangan yang dilakukan maka akan semakin besar pembangunan infrastruktur publik yang dapat dikerjakan oleh Pemerintah Daerah dan hal tersebut secara langsung akan mengakibatkan kesejahteraan bagi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat. Dengan demikian, kualitas kinerja keuangan daerah yang baik mengindikasikan daerah yang bersangkutan mampu membiayai kebutuhan guna menyelenggarakan otonomi daerahnya.

H<sub>3</sub>: Kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

H<sub>4</sub>: Kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan pada seluruh kabupaten/kota provinsi Bali dengan cakupan 8 kabupaten dan 1 kota madya, dengan total keseluruhan 9 wilayah kabupaten/kota. Data yang dikumpulkan berjumlah 45 amatan yang terbagi atas 9 kabupaten/kota selama 5 tahun, dimana lokasi yang dipilih adalah di Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali periode 2009-2013. Variabel terikat yang diteliti adalah Pertumbuhan Ekonomi. Variabel bebas yang digunakan adalah PAD dan DAU. Selanjutnya pemoderasi yang diteliti adalah Kinerja Keuangan Daerah. Pendekatan kuantitatif diacu sebagai desain penelitian, dengan bentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipakai untuk memperoleh jawaban dari hipotesis yang telah ditetapkan melalui populasi atau sampel yang diteliti (Sugiyono, 2010:13). Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui bagaimana relasi antar dua variabel atau lebih (Rahyuda dkk., 2004:17). Pada penelitian ini variabel yang diuji yaitu pengaruh PAD dan DAU pada pertumbuhan ekonomi yang dimoderasi oleh kinerja keuangan daerah.

Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari peningkatan produk domestic regional bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah output bersih yang diakumulasikan dari semua kegiatan perekonomian di daerah tertentu, biasanya dihitung dalam satu tahun. PDRB biasanya digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan barang dan jasa yang dihasilkan secara regional. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:

$$G_t = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1}) \times 100\%}{PDRB_{t-1}} \dots\dots\dots(1)$$

keterangan:

- $G_t$  = pertumbuhan ekonomi periode t
- $PDRB_t$  = PDRB periode t (berdasarkan harga konstan)
- $PDRB_{t-1}$  = PDRB satu periode sebelumnya

Kinerja keuangan daerah merupakan hasil kerja yang berhasil dicapai di bidang keuangan meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah dengan ketentuan perundang-undangan sebagai alat ukur yang ditetapkan dalam satu periode anggaran. Menurut Mardiasmo (2009), kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran yaitu dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Pengukuran kinerja keuangan daerah pada diukur dengan melihat tinggi rendahnya penyerapan anggaran daerah, yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Serapan Anggaran} = (\text{Realisasi/Anggaran}) \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Populasi penelitian terdiri dari segenap data APBD yang direalisasikan dalam laporan anggaran kabupaten/kota di Provinsi Bali periode 2009-2013. Sampel ditentukan melalui teknik sampel jenuh, dengan memakai seluruh populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2010:122).

Pengumpulan data menggunakan metode observasi non perilaku, dengan mempelajari dokumen atau catatan yang dimuat oleh individu dan/atau instansi yang terkait dengan topik penelitian, kemudian data tersebut dicatat, dikutip, dan didokumentasikan dari arsip-arsip yang terdapat di situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan, Biro Keuangan Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali, serta

dengan mengacu penelitian empiris sebelumnya dan buku-buku yang mendukung opini dari hasil yang diperoleh.

Analisis data yang dipakai memanfaatkan teknik *Moderated Regression Analysis (MRA)* dengan mengoperasikan program SPSS. Teknik ini dimanfaatkan untuk melihat bagaimana pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Kinerja Keuangan Daerah sebagai variabel pemoderasi. Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, kemudian dilanjutkan dengan perumusan model *Moderated Regression Analysis (MRA)*, koefisien determinasi, uji kesesuaian model (uji F), uji t, dan uji hipotesis.

Persamaan *Moderated Regression Analysis (MRA)* yaitu:

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 \text{KKD} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{KKD} * \text{PAD} + \beta_5 \text{KKD} * \text{DAU} + \mu_i \dots (3)$$

Keterangan:

Y	=	Pertumbuhan Ekonomi
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta$	=	Koefisien Regresi
KKD	=	Kinerja Keuangan Daerah
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DAU	=	Dana Alokasi Umum
$\mu$	=	Standar Error (Nilai Residu)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas ditunjukkan pada tabel berikut ini. Uji normalitas digunakan untuk memastikan normal atau tidaknya distribusi dalam residual dari model regresi yang dibuat. Berdasarkan tabel 1 nilai Sig. (2 – tailed) yang dicapai melalui uji tingkat kenormalan adalah sebesar 0,933 (> 0,05) atau dapat dinyatakan nilai signifikansi yang diperoleh

(0,933) lebih besar dari (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan data yang diuji dinyatakan tersebar secara normal.

**Tabel 1.**  
**Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	0.52879729
Most Extreme Differences	Absolute	0.080
	Positive	0.080
	Negative	-0.063
Kolmogorov-Smirnov Z		0.540
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.933

Sumber: Data diolah (2015)

**Tabel 2.**  
**Uji Autokorelasi**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0.679 <sup>a</sup>	0.460	0.421	0.548	2.234

Sumber: Data diolah (2015)

Uji autokorelasi digunakan untuk memprediksi adanya korelasi auto atau pengaruh data dari pengamatan sebelumnya dalam model regresi. Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui nilai DW yang diperoleh adalah sebesar 2,234. Nilai  $dU$  untuk jumlah sampel 45 dengan 3 variabel bebas adalah 1,6148. Maka nilai  $4 - dU$  adalah 2,3852, sehingga hasil uji autokorelasinya adalah  $dU < DW < 4 - dU$  yaitu  $1,6148 < 2,234 < 2,3852$ , maka data bebas autokorelasi.

**Tabel 3.**  
**Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
PAD	0.945	1.058
DAU	0.897	1.115
KKD	0.947	1.056

Sumber: Data diolah (2015)

Uji multikolinearitas dipergunakan untuk meneliti apakah data bebas dari gejala multikolinearitas. Hal ini dipandang dari matriks korelasi antar variabel bebas. Hasil analisis berhasil memperoleh nilai tolerance untuk PAD sebesar 0,945 ( $> 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 1,058 ( $< 10$ ). Selanjutnya DAU dengan perolehan nilai tolerance sebesar 0,897 ( $> 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 1,115 ( $< 10$ ). Kemudian Kinerja Keuangan Daerah mencapai nilai tolerance sebesar 0,947 ( $> 0,1$ ) dan nilai VIF sebesar 1,056 ( $< 10$ ). Oleh karena variabel PAD, DAU dan Kinerja Keuangan Daerah mencapai nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian bebas dari multikolinearitas.

**Tabel 4.**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.237	0.334		0.710	0.482
PAD	1.202E-13	0.000	0.183	1.182	0.244
DAU	-2.897E-13	0.000	-0.122	-0.763	0.450
KKD	0.003	0.004	0.130	0.838	0.407

Sumber: Data diolah (2015)

Uji heteroskedastisitas ditujukan untuk mengetahui ketidaksamaan varians dari residual dalam model regresi antar pengamatan dengan yang lain. Tabel 4 menunjukkan signifikansi setiap variabel bebas pada nilai absolute residual lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Uji Kesesuaian Model (Uji F) bertujuan untuk menguji kelayakan dari penelitian ini atau model regresi, dengan asumsi variabel bebas mampu menjelaskan oleh variabel terikat. Sedangkan Analisis koefisien determinasi



digunakan untuk mengetahui tinggi rendahnya variabel independen dalam memengaruhi variabel dependennya. Hasil Uji Kesesuaian Model (Uji F) dan Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) pada penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.**  
**Uji Kesesuaian Model (Uji F)**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	9.974	3	3.325	14.982	0.000 <sup>a</sup>
Residual	7.323	33	0.222		
Total	17.297	36			

Sumber: Data diolah (2015)

Tabel 5 menginterpretasikan *p-value* mencapai angka 0,000 lebih rendah dari signifikansi 0,05 maka model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel bebas dan moderasi pada variabel terikat.

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,529, memiliki arti bahwa variabel PAD, DAU dan Kinerja Keuangan Daerah mampu menjelaskan variasi perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 52,9% dan sisanya 47,1% disebabkan oleh faktor lain di luar penelitian.

**Tabel 6.**  
**Koefisien Determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
	0.771 <sup>a</sup>	0.594	0.529	0.476

Sumber: Data diolah (2015)

Statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data dalam penelitian meliputi banyaknya amatan, nilai minimum dan maksimum, nilai rata-rata, serta standar

deviasi. Dari total 45 amatan yang lulus seleksi uji asumsi klasik, kemudian diperoleh nilai deskripsi statistik menjelaskan pencapaian dari nilai terbesar, terkecil dan nilai rata-rata, yang secara menyeluruh dipaparkan pada tabel 7.

**Tabel 7.**  
**Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
PAD	45	7.E7	2.E12	2.80E11	4.831E11
DAU	45	1.E11	8.E11	4.21E11	1.328E11
KKD	45	8	120	89.29	13.592
PE	45	4	7	5.40	0.720
Valid N (listwise)	45				

*Sumber:* Data diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat dilihat bahwa nilai variabel PAD mencapai nilai terendah sebesar 70.000.000 dan nilai tertinggi sebesar 2.000.000.000.000 dengan nilai rata-rata sebesar 280.000.000.000. Standar deviasi untuk PAD sebesar 483.100.000.000. Artinya terjadi penyimpangan nilai PAD yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 483.100.000.000. Variabel DAU memiliki nilai terendah sebesar 100.000.000.000 dan nilai tertinggi sebesar 800.000.000.000 dengan nilai rata-rata sebesar 421.000.000.000. Standar deviasi untuk DAU sebesar 132.800.000.000. Artinya terjadi penyimpangan nilai DAU yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 132.800.000.000. Variabel Kinerja Keuangan Daerah (KKD) memperoleh nilai terendah sebesar 8,00 dan nilai tertinggi sebesar 120,00 dengan nilai rata-rata sebesar 89.29. Standar deviasi untuk Kinerja Keuangan Daerah sebesar 13.592. Artinya terjadi penyimpangan nilai Kinerja Keuangan Daerah yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 13.592. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) mencapai nilai terendah dengan angka 4.00 dan nilai tertinggi sebesar 7.00 dengan nilai rata-rata sebesar 5.40.

Standar deviasi untuk Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.720. Artinya terjadi penyimpangan nilai Pertumbuhan Ekonomi yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 0.720.

Pengujian MRA dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel merupakan variabel pemoderasi adalah dengan melakukan uji interaksi. Regresi dengan melakukan uji interaksi antar variabel disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil olahan MRA tersaji pada Tabel 8. Berdasarkan Tabel 8 dapat dikembangkan persamaan regresi yang dihasilkan melalui *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

$$PE = -22.797 - 0.049 \text{ KKD} + 0.086 \text{ PAD} + 7.430\text{E-}15 (\text{PAD.KKD}) + e... (4)$$

Berdasarkan persamaan MRA di atas dapat diketahui bahwa nilai konstanta -22.797 memiliki makna apabila PAD, DAU dan KKD sama dengan nol maka Pertumbuhan Ekonomi sama dengan 22.797 satuan, sedangkan tanda “negatif” pada konstanta merupakan kecenderungan tanda pada uji moderasi (Ghozali, 2011). Nilai koefisien regresi PAD sebesar 0.086 bermakna jika PAD naik sebesar satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 0.086 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi Kinerja Keuangan Daerah (KKD) sebesar -0.049 memiliki arti apabila Kinerja Keuangan Daerah (KKD) naik sebesar satu satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan turun sebesar 0.049 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai koefisien regresi PAD.KKD sebesar 7.430E-15 mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya semakin tinggi moderasi Kinerja Keuangan Daerah (KKD), maka pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi meningkat.

**Tabel 8.**  
**Koefisien Beta Variabel Penelitian dan Konstanta**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-22.797	7.257	
PAD	0.086	0.057	0.223
DAU	-0.737	0.906	-0.351
KKD	-0.049	0.024	-0.931
PAD.KKD	7.430E-15	0.000	0.437
DAU.KKD	1.602	0.889	1.220

Sumber: Data diolah (2015)

Uji t atau uji hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dan variabel moderasi secara individual. Jika  $p\text{-value} < 0,05$ , maka hipotesis alternatif diterima dan begitu sebaliknya. Berdasarkan tabel 9 diketahui hasil uji hipotesis penelitian yaitu: Hipotesis pertama ( $H_1$ ) PAD terbukti memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif. Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai P-value pengaruh PAD pada Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.140 yang melebihi 0,05 dengan pencapaian koefisien regresi sebesar 0.086. Artinya PAD berpengaruh positif tetapi tidak signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi. Interpretasi tersebut tidak sejalan dengan hipotesis  $H_1$  di mana PAD berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali serta hasil penelitian ini sejalan dengan argumen Andi Gustiana (2014) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah tidak mampu memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis kedua ( $H_2$ ) menyatakan DAU berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai P-value pengaruh DAU pada Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 0.421 ( $>0,05$ ) serta pencapaian koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0.737. Hal ini membuktikan DAU tidak mampu memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini menolak hipotesis  $H_2$  yang menyatakan DAU berpengaruh positif pada

Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali serta hasil tersebut sejalan dengan hasil yang diperoleh Andi Gustiana (2014) yang menyatakan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menyatakan kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Tabel 9 menunjukkan perolehan nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah dalam memengaruhi hubungan antara PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.007 ( $<0,05$ ). Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh dan dapat memoderasi hubungan PAD dengan Pertumbuhan Ekonomi. Nilai koefisien regresi PAD.KKD sebesar  $7.430E-15$  menjelaskan bahwa Kinerja Keuangan Daerah meningkatkan relasi PAD dalam memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini menerima hipotesis  $H_3$  yang menyatakan kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh PAD pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Hipotesis keempat ( $H_4$ ) menyatakan kinerja keuangan daerah memoderasi (meningkatkan) pengaruh DAU pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Kemudian perolehan nilai signifikansi uji t dua sisi untuk variabel pemoderasi Kinerja Keuangan Daerah dalam memengaruhi hubungan antara DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0.079 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah tidak mampu memengaruhi sekaligus tidak dapat memoderasi hubungan DAU dengan Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini menolak hipotesis  $H_4$  yang menyatakan kinerja keuangan daerah memoderasi

(meningkatkan) pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

**Tabel 9.**  
**Hasil *Moderated Regression Analysis***

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-22.797	7.257		-3.141	0.003	
PAD	0.086	0.057	0.223	1.506	0.140	Ditolak
DAU	-0.737	0.906	-0.351	-0.813	0.421	Ditolak
KKD	-0.049	0.024	-0.931	-2.069	0.045	Diterima
PAD.KKD	7.430E-15	0.000	0.437	2.842	0.007	Diterima
DAU.KKD	1.602	0.889	1.220	1.802	0.079	Ditolak

*Sumber:* Data diolah (2015)

## SIMPULAN DAN SARAN

Berikut simpulan yang diperoleh yaitu PAD terbukti mampu memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi secara positif tetapi tidak signifikan pada di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena kurang cermatnya pemerintah daerah dalam menganggarkan pendapatan asli daerah dimana target anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terlalu rendah dari realisasinya. Seperti yang diketahui potensi dari Provinsi Bali sangatlah baik, hal tersebut dapat dilihat dari sektor pariwisata yang terdapat di Bali yang merupakan penyumbang pajak terbesar guna menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Dengan kata lain sumber dana yang diperoleh daerah melalui pajak sektor pariwisata tersebut melebihi dari target anggaran pendapatan asli daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

DAU tidak berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengaruh negatif dan tidak signifikannya DAU pada Pertumbuhan Ekonomi terjadi karena sumber dana DAU yang dilimpahkan Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah tersebut hanya dialokasikan sebagai sumber dana untuk belanja pegawai. Sumber DAU tersebut merupakan sumber dana yang besar akan tetapi sumber dana tersebut sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai seperti gaji PNS dan tunjangan kesehatan bagi PNS dan tidak dialokasikan langsung ke pembangunan infrastruktur demi menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Selain itu tidak meratanya pengalokasian DAU ke daerah-daerah disinyalir menjadi penyebab tidak berpengaruhnya DAU pada Pertumbuhan Ekonomi. Kinerja Keuangan Daerah mampu meningkatkan pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karena secara parsial Kinerja Keuangan Daerah berpengaruh pada Pertumbuhan Ekonomi dan juga mampu memoderasi PAD dalam memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, maka variabel Kinerja Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai variabel moderasi.

Kinerja Keuangan Daerah tidak mampu meningkatkan pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kondisi ini terjadi karena Kinerja Keuangan Daerah sebagai pemoderasi mereduksi pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga pengaruh DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan. Selain kondisi tersebut, tingkat persentase kinerja keuangan daerah yang masih kurang maksimal yaitu masih dibawah 100% dan sumber pendanaan DAU yang hanya diperuntukan untuk belanja pegawai seperti gaji PNS dan tunjangan kesehatan bagi PNS juga memicu gagalnya pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan pemaparan simpulan sebelumnya adalah Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan sektor pariwisata

guna menunjang perolehan PAD yang nantinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur publik yang diharapkan dapat mendorong perekonomian dan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Selain itu juga pemerintah daerah diharapkan untuk menggali kembali sumber PAD yang terdapat di setiap daerah guna meningkatkan infrastruktur publik.

Pemerintah Daerah diharapkan perlu mempertimbangkan agar DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat tidak hanya dialokasikan untuk belanja pegawai melainkan diharapkan sebagian besar dana dari DAU tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Selain itu juga pemerintah daerah diharapkan tetap mempertahankan kemandirian keuangan dengan menggunakan PAD sebagai pembiayaan keperluan daerah dan tidak selalu bergantung pada DAU serta peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti kembali namun dengan periode tahun dan wilayah yang berbeda sehingga hasil dari penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian di daerah lain, selain itu juga kita dapat membandingkan keadaan di Provinsi Bali dengan daerah lain.

## **REFERENSI**

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu.
- Ahmad, Abd.R., Alan Farley & Moonsamy Naidoo. 2012. *Analysis of Government-University Relationship from the Perspective of Agency Theory*. *Journal of Education and Practice*, 3(6).
- Bappenas, 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.



- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Darwanto dan Yustikasari. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Kasus Kabupaten /Kota se-Jawa Bali tahun 2004-2005.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Keserasian Belanja Daerah sebagai Variabel Pemoderasi. *"Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2. Juli 2013.*
- Faridi, M.Zahir. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth : Evidence from Pakistan. Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 31(1), pp: 1-33.
- Ghozali, I., 2011, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Universitas Diponegoro Semarang.
- Gunantara, Putu Candra dan Dwirandra, A.A.N.B. 2014. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel Pemoderasi di Bali." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3 (2014): 529-546.
- Hamzah, A. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan. Pendekatan Analisis Jalur, Universitas Trunojono.
- Hasan, T.I.B. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*, 1(1).
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. *Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Julitawati, Ebit. Darwanis, dan Jalaluddin. 2012. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh." *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.*

- Malik, Shahnawaz. Hassan, Mahmood Ul and Hussain, Shahzad. 2006. *Fiscal Decentralization and Economic growth in Pakistan. Department of Economics, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan.*
- Maggi, Eva Maria dan Ladurner, Ulrich. 2009. Federal Features and Financial Decentralization. Inhouse Seminar. Eurac Research.
- Maryati, Ulfi dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. Padang: Politeknik Negri Padang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. *Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.
- Musgrave, Richard.1959. *Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*, New York: McGraw.
- Nemec, J. dan G. Wright, (Ed.). 1997. *Public Finance: Theory and Practice in Central European Transition*, Osnoy, Kiev.
- Oates, W.E. 1972. "Fiscal Decentralization and Economic Development." *National Tax Journal* 46.
- Oates, W.E. 1999. "An Essay on Fiscal Federalism", *Journal of Economic Literature*, 37(3), September: 1120-49.
- Penthury, M.A. 2011. *Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure. Economic Journal Of Emerging Markets*, 3(3), pp: 289-297.
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2008. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar. Jakarta : Lembaga Penerbit FE-UI.
- Rahyuda. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana-Press.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Scott, W.R., 2000. *Financial Accounting Theory*. Second Edition. New Jersey: Prentice Hall.

- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi. 2007. "Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Desember 2007*, Vol.4, No.2, hal. 211-228.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Jogjakarta.
- Simanjuntak. 2006. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu*, Tesis, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Bisnis*.Bandung: Alfabeta.
- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2: 109-124.
- Sukirno, Sadono. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tamtomo, Edi. 2010. Analisis Pertumbuhan Daerah di Era Desentralisasi. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tirtosuharto, D. (2010),The Impact of Fiscal Decentralization and State Allocative Efficiency on Regional Growth in Indonesia', *Journal of International Commerce, Economics and Policy*, 1 (2): 287-307.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Utama, Suyana.2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.
- Wertianti, I G A Gede dan Dwirandra, A.A.N.B. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3 (2013): 567-584.